



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

BKSP Prioritaskan Macet dan Banjir

JAKARTA Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekjur memprioritaskan penanganan banjir dan kemacetan. Selain dua persoalan itu, permasalahan mendasar lainnya, yakni penyediaan air bersih, persampahan, serta ketahanan pangan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai Kepala BKSP Jabodetabekjur membuka dan memimpin rapat kerja yang membahas sejumlah program kerja strategis bersama kepala daerah di masing-masing wilayah. Anggota BKSP berjumlah sembilan kepala daerah di tingkat kota/kabupaten yang berada di sekitar wilayah Jakarta.

Kami apresiasi sikap Gubernur Anies untuk memperbaiki permasalahan karena pada pemerintahan sebelumnya tidak berjalan dan justru korap saling menyalahkan. Kami harap ini langkah awal dalam mengatasi permasalahan di Jakarta.

ABRAHAM LUNGGANA
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta

BKSP telah melakukan kajian sekaligus mencari solusi program pembangunan yang menjadi prioritas utama karena menyangkut kepentingan bersama. "Selama dua pekan, tim akan bekerja membahas hal-hal yang tadi diungkapkan dalam rapat kerja sekaligus solusi untuk dilaksanakan," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin.

Beberapa solusi atas permasalahan atau kebutuhan men-

dasar yang dihadapi setiap wilayah antara lain normalisasi daerah aliran air sungai untuk menangani banjir, peningkatan jalan lintas batas untuk menangani kemacetan, pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) untuk menangani sampah, dan penambahan penjelasan untuk mengatasi kemacetan di Jalur Puncak.

Nurhayanti menilai, keberadaan Jalur Puncak T merupakan solusi bagi kemacetan Jalur Puncak I yang sudah mengalami macet setiap harinya. Dia berharap melalui BKSP selain mendapatkan solusi mengatasi kemacetan, juga membuka pertumbuhan, baik di Cianjur, Bekasi, maupun Karawang. "Ada persoalan yang kita dorong ke pemerintah pusat dan kerja sama dengan Pemprov DKI," ungkapnya.

Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany menuturkan, persoalan utama di wilayahnya adalah kemacetan lantaran banyak warga Tangerang Raya bekerja di ibu kota. "Solusinya ada transportasi massal, jaringan jalan, dan lain-lain. Transportasi massal misalnya itu dari perkeretaapian, mass rapid transit (MRT), light rail transit (LRT), dan bus rapid transit (BRT). Nanti akan dirumuskan sehingga ada timetable siapa berbuat apa," katanya.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta mengenai sampah, pembangunan waduk untuk penyediaan air bersih, tiket terusan yang terpadu untuk peribonahan transportasi, dan pembangunan sistem distribusi pangan untuk ke-

tahanan pangan.

Hal terpenting dalam rapat kerja BKSP ini harus intensif dikomunikasikan dan menjadikan BKSP betul-betul kerja sama yang aktif karena permasalahan dihadapi di wilayah berdelatan bisa diselesaikan bersama. "Seharian dari problem yang kita hadapi adalah problem lintas wilayah yang tidak bisa diselesaikan sendiri-an, harus diselesaikan bersama. Rapat kerja tadi disepakati bahwa kerja sama di tingkatkan dan bukan hanya di level pertemuan tri, tapi SKPD yang terkait diinstruksikan untuk melaksanakan," ujarnya.

Anies menyebut permasalahan di BKSP juga harus diselesaikan bersama pemerintah pusat. Karena itu, BKSP diharapkan menjadi forum yang aktif secara serius menyelesaikan permasalahan sampai tuntas. "Kita bisa berbicara dengan pemerintah pusat juga bukan sebagai masing-masing unit kabupaten/kota/provinsi, melainkan bersama-sama sebagai satu wilayah yang memiliki satu agenda dan kepentingan yang sama," ujarnya.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa menuturkan, untuk mengatasi permasalahan banjir dan macet di Jakarta ada beberapa langkah yang akan dilakukan Pemprov Jabar. Khusus banjir, penyelesaiannya melalui normalisasi Waduk Cimahi dan Waduk Sukamahi yang berada di Kabupaten Bogor. Untuk mengatasi kemacetan, dia mengusulkan Jalur Puncak II dari Sentul sampai dengan Cipanas dipertimbangkan kembali. Iwa meminta Bupati Bogor karta Abraham Lunggana (Lung) mengapresiasi langkah Anies yang mengintensifkan kembali BKSP untuk mengatasi berbagai permasalahan, khususnya banjir dan macet di Jakarta.

Menurut dia, permasalahan tersebut tidak mungkin bisa di-

lakukan Pemprov DKI tanpa ada campur tangan pemerintah daerah/kota-kota penyangga dan pemerintah pusat. "Kami apresiasi sikap Gubernur Anies untuk memperbaiki permasalahan karena pada pemerintahan sebelumnya tidak berjalan dan justru korap saling menyalahkan. Kami harap ini langkah awal dalam mengatasi permasalahan di Jakarta," ujarnya.

♦ bima setiyadi

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

BKSP Prioritaskan Macet dan Banjir

PERSOALAN LINTAS WILAYAH

Permasalahan lintas wilayah yang terjadi di Jakarta ataupun kota-kota penyangga masih belum terselesaikan. Persoalan tersebut seperti banjir, kemacetan, air bersih, dan sampah.

PERMASALAHAN LINTAS WILAYAH
SINDO

Solusi

- Normalisasi daerah aliran sungai untuk menanggulangi banjir
- Peningkatan jalan lintas batas untuk menanggulangi kemacetan
- Pembangunan terpadu pengendalian sampah terpadu (TPST) untuk penanganan sampah
- Pembangunan waduk untuk penyediaan air bersih
- Jikat terusan terpadu untuk pembenakan transportasi
- Pembangunan sistem distribusi pangan untuk keragaman pangan

Pengajuan bantuan ketangan 2018 dari kota-kota penyangga:

Rp269,96 Miliar

Kabupaten Bogor: Rp13,2 miliar

- Pengadaan sepeda motor pengangkut sampah
- Program aksi penanganan sampah di hulu Sungai Ciliwung
- Pengadaan dump truck
- Penjarangan sampah apung di Ciliwung dan Kali Baru
- Pembangunan Ipal
- Pengadaan alat kodokteran di RSUD Cilewi

Kabupaten Cianjur: Rp8,1 miliar

- Pengadaan ekskavator
- Pengadaan dump truck
- Pembangunan jembatan gantung

Kota Depok: Rp25 miliar

- Penataan waduk-waduk seperti penataan situ Pedongkelan, situ Universitas Indonesia (UI) dan daerah tetapannya
- Pelebaran akses flyover UI
- Pembangunan Ipal komunal

Kota Bogor: Rp10 miliar

- Pembangunan sarana dan prasarana penanggulangan banjir

Kota Tangerang: Rp10 miliar

- Pembangunan sarana dan prasarana penanggulangan banjir

Kota Bekasi: Rp208 miliar

- Gabungan dan usulan 2018 sebesar Rp138 miliar dan usulan Pemprov DKI pada 2017 sebesar Rp70 miliar
- Kompensasi pengeluaran daerah UI TPST Bantargebang
- Perbaikan infrastruktur

Sumber: Laporan tahunan dan berbagai sumber